

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENGATASI KRISIS PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Anisa Candra Maharani¹, Erliana Mufidatul Azizah², Iin Meita³, Kansa Anastarika⁴

Akuntansi

Fakultas Hukum dan Bisnis

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Surakarta

(0271) 7470550

E-mail: 240416007@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Indonesia telah mengalami berbagai krisis ekonomi yang menantang, seperti krisis moneter 1997–1998, krisis global 2008, dan pandemi COVID-19 pada 2020. Ketiga periode tersebut menunjukkan masalah ekonomi utama bangsa, seperti inflasi tinggi, kontraksi pertumbuhan, dan lemahnya ketahanan fiskal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi krisis perekonomian Indonesia dengan menggunakan kebijakan fiskal dan program pemulihan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga internasional. Untuk menentukan pola intervensi pemerintah yang efektif, analisis konten dan perbandingan lintas krisis digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam proses distribusi, alokasi, dan stabilisasi dana. Terbukti bahwa kebijakan fiskal ekspansif seperti subsidi sosial dan belanja infrastruktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi domestik telah meningkat dan daya tahan UMKM telah ditingkatkan oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi. Akibatnya, Indonesia dapat bangkit dari kontraksi pertumbuhan 5,32% pada tahun 2020 menuju pertumbuhan yang positif di tahun berikutnya. Hasil menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi tidak hanya kuratif tetapi juga preventif melalui kerja sama pusat-daerah dan tata kelola fiskal yang jelas.

Kata Kunci: Tanggung jawab pemerintah, Krisis ekonomi, Kebijakan fiskal, Pemulihan ekonomi, UMKM.

Abstract

Indonesia has experienced various challenging economic crises, such as the 1997–1998 monetary crisis, the 2008 global crisis, and the COVID-19 pandemic in 2020. The three periods show the nation's main economic problems, such as high inflation, growth contraction, and weak fiscal resilience. The purpose of this study is to evaluate the government's responsibility in overcoming Indonesia's economic crisis by using fiscal policies and economic recovery programs. This study uses a qualitative method with a literature study. The data sources for this study come from scientific journals, official government reports, and publications of international institutions. To determine patterns of effective government intervention, content analysis and cross-crisis comparisons are used. Research shows that governments play an important role in the process of distribution, allocation, and stabilization of funds. It is evident that expansionary fiscal policies such as social subsidies and infrastructure spending boost economic growth. Domestic consumption has increased and the resilience of MSMEs has been enhanced by the National Economic Recovery Program (PEN) during the pandemic. As a result, Indonesia can rise from a growth contraction of 5.32% in 2020 to positive growth in the following year. The results show that the government's responsibility in dealing with the economic crisis is not only curative but also preventive through center-regional cooperation and clear fiscal governance.

Keywords: Government responsibility, Economic crisis, Fiscal policy, Economic recovery, MSMEs.

1. Pendahuluan

Krisis ekonomi merupakan bagian dari siklus perekonomian yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih sangat bergantung pada pasar global dan telah menghadapi berbagai krisis sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1997-1998 merupakan peristiwa krisis moneter yang paling berat, saat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi -13,13% pada tahun 1998. Krisis global yang terjadi pada 2008 di Indonesia relatif lebih terkendali karena penekanan pertumbuhan perekonomian hanya menjadi 6,01% dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,35%. Pada triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi jatuh ke angka -5,32% lebih rendah dari krisis 1998 dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional.

Krisis-krisis yang terjadi memperlihatkan bahwa perekonomian di Indonesia masih rapuh dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti harga minyak dunia, arus modal global, dan kondisi politik dalam negeri. Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan program sosial. Berbagai langkah yang dilakukan, antara lain pemberian stimulus fiskal, subsidi, restrukturisasi utang, serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang banyak diarahkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi krisis perekonomian di Indonesia. Dari sisi teori, penelitian ini menegaskan pandangan Keynesian yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Sementara itu dari sisi praktik, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif, transparan, dan inklusif agar dampak krisis tidak semakin meluas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis berbagai episode krisis yang dialami Indonesia sebagai dasar dalam menyusun strategi pengelolaan krisis di masa mendatang.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memahami dan menganalisis peran pemerintah dalam menghadapi krisis perekonomian melalui pengalaman masa lalu serta kebijakan yang diterapkan pada periode kontemporer. Data yang bersumber dari literatur sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai referensi resmi, seperti jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, laporan instansi pemerintah (kementerian keuangan, BPS, dan Bank Indonesia), serta publikasi lembaga internasional, antara lain IMF dan Bank Dunia. Sumber tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, dengan tema penelitian yang relevansi, serta keterbaruan publikasi yang dibatasi maksimal sepuluh tahun terakhir.

Analisis data ini dilakukan dengan teknik content analysis untuk menelaah pola kebijakan fiskal dan moneter yang pemerintah terapkan pada saat masa krisis. Validitas hasil dijaga melalui penerapan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi agar menghasilkan penelitian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis komparatif dengan membandingkan strategi kebijakan pemerintah pada krisis tahun 1997-1998, krisis global 2008 dan pandemi Covid-19 tahun 2020. Dengan pendekatan tersebut penelitian tidak hanya menyajikan uraian konseptual tetapi juga memberikan evaluasi terhadap efektivitas dalam kebijakan dalam mengurangi dampak krisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian literatur yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dalam menjaga stabilitas ekonomi pada masa krisis, pemerintah memegang tanggung jawab yang besar. Tiga fungsi utama yang mencerminkan pelaksanaan kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Rantebua et al. (2020), fungsi alokasi diwujudkan dalam bentuk belanja negara yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberian subsidi, fungsi distribusi melalui program bantuan sosial, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga inflasi dan defisit anggaran tetap terkendali. Pemerintah berusaha meredam dampak dari krisis ekonomi yang terjadi dengan melaksanakan ketiga fungsi tersebut dan juga memastikan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Menurut Hidayat et al. (2025), kebijakan fiskal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Terbukti bahwa inisiatif seperti insentif pajak, subsidi modal kerja, dan dukungan belanja pemerintah membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) bertahan di tengah krisis. Salah satu alasan utama mengapa intervensi fiskal yang berkelanjutan diperlukan adalah kontribusi UMKM, yang mencapai lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap ratusan juta tenaga kerja. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan kendala implementasi, di mana beberapa pelaku UMKM belum merasakan manfaat sepenuhnya karena keterbatasan informasi dan birokrasi yang rumit.

Instrumen utama yang terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi adalah kebijakan fiskal. Arkaan & Yulianto, (2025) menyebutkan bahwa pertumbuhan PDB sebesar 5,31% diperoleh dari kontribusi belanja infrastruktur sebesar Rp392 triliun di tahun 2023, yang menunjukkan adanya multiplier effect dari pengeluaran pemerintah dan menjelaskan tentang cara mendorong permintaan agregat dan memulihkan perekonomian dengan meningkatkan belanja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriawaty & Maipita, (2023), menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID -19 terdapat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berfokus pada konsumsi domestik, dukungan UMKM, dan stabilisasi moneter, yang terbukti efektif dalam mengeluarkan perekonomian Indonesia dari kontraksi sebesar -5,32% pada 2020 menuju pertumbuhan positif di tahun berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati et al., (2024) juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya investasi daerah merupakan hambatan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dapat diartikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah yang kuat lebih mampu membantu keberhasilan penanganan krisis ekonomi yang terjadi, jika hanya bergantung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi tidak hanya cukup melalui kebijakan fiskal, tetapi juga dengan memastikan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif disemua lini. Menurut Salsyabillah et al, (2024), lemahnya koordinasi dan keterlambatan kebijakan yang dapat memperburuk dampak krisis serta memperlambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang adaptif, transparan, dan inklusif agar mampu menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam mengatasi krisis ekonomi, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar melalui kebijakan fiskal, moneter, dan program intervensi sosial. Bukti empiris memperlihatkan stimulus fiskal, belanja infrastruktur, dan dukungan dari UMKM mampu meredam dampak krisis serta mendorong pemulihan ekonomi.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi fiskal, penguatan sinergi pusat-daerah, dan fokus pada pemberdayaan UMKM. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada pendekatan literatur tanpa melibatkan data primer lapangan. Oleh sebab, itu penelitian selanjutnya disarankan

dapat menggabungkan metode kuantitatif untuk menganalisis secara detail efektivitas kebijakan fiskal terhadap indikator makroekonomi.

Untuk mengukur secara lebih mendalam bagaimana kebijakan fiskal dan program pemulihan ekonomi berdampak pada indikator makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat, saran penelitian selanjutnya adalah untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan menggunakan data primer. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas subjek penelitian dengan membandingkan kebijakan penanganan krisis di Indonesia dengan kebijakan negara berkembang lainnya.

Daftar Pustaka

- Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi review of fiscal policy and economic growth 1,2,3,4. *Jurnal Intelek Cendikia*, 2, 4196–4207.
- Fitrawaty, F., & Maipita, I. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Kasus: Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 151–164. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i1.5047>
- Kurniati, E., Supriyaningsih, O., Andini, D. T., Lestari, E. D., & Prameswari, S. P. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, November, 6064–6076.
- Rantebua, S., Rosnawintang, R., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 43458–43466. <https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.11671>
- Salsyabillah, M., Azaddin, T. Z. A., Radiansyah, & Batubara, M. (2024). Krisis Ekonomi Di Indonesia : Penyebab , Dampak Dan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 475–479.